

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
DI DESA BANJARARUM KECAMATAN KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)**



Oleh :

NELSON IBRAHIM BENU
NIM. 09182434/P

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Masalah	6
E. Keaslian Penelitian dan Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoretis	11
B. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Teknik Pengambilan Sampel	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah	30
B. Iklim dan Topografi	32
C. Penggunaan Tanah	34
D. Pemerintahan	35
E. Kependudukan	37
F. Mata Pencaharian	38
G. Pendidikan	39
H. Sarana dan Prasarana	40

	Hal.
BAB V	PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 42
	A. Jenis, Luas dan Penggunaan Tanah Kas Desa 42
	B. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Tanah Kas Desa 45
	C. Sistem Bercocok Tanam Yang Diterapkan 64
BAB VI	PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP 67
	A. Sistem Sewa 67
	B. Sistem Bagi Hasil 69
BAB VII	PENUTUP 78
	A. Kesimpulan 78
	B. Saran 78
	DAFTAR PUSTAKA 80
	LAMPIRAN

ABSTRACT

This study aims to: 1) determine how the land management system conducted in the village treasury land of Banjararum village. 2) determine the effect of soil management systems on the level of the village treasury income of farmers.

The research uses a qualitative approach. Techniques used in the study is collecting data through interviews and document research to obtain data on the management of village treasury land in the Banjararum village.

The results showed that: 1) management conducted in the Banjararum Village District of Kalibawang are: self-managed (for *pelungguh / bengkok* as salary of village staff, public facilities / social facilities) with an area of 56.9928 ha (77.63%), leased to sugar mills (PG) Madukismo with a broad 4.651 ha (6.33%) and produced by the community by way of lease and for measuring the results of 11.7763 ha (16.04%). 2) Village treasury land management system produced by the public either by rental or a way for the results has provided an increase in the income and welfare of farmers. Smallholder farmers through farmer groups get help from the Department of Agriculture in the form of seeds, fertilizers, agricultural technology and farming systems (*jajar legowo* cropping systems) are very helpful to farmers to increase agricultural production.

Keywords: Village Treasury Land, public welfare, farmer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah merupakan sarana vital bagi manusia karena fungsinya sebagai sumber kehidupan. Segala aktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari dilakukan di atas tanah baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal. Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu harus digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Hal tersebut berarti tanah bukan dimiliki Negara tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya dengan tujuan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dimana ditandai dengan keadaan ekonomi (pendapatan) suatu masyarakat yang mencukupi kebutuhan hidupnya. “Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya

kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya.” (dalam www.elib.unikom.ac.id). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi yang semakin baik akan mempengaruhi peningkatan kemakmuran. Dari hal tersebut tampak bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan berita resmi statistik, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian tentunya membutuhkan tanah sebagai salah satu faktor penting, dimana tanah merupakan sarana utama sebagai media bercocok tanam. Sampai saat ini masih banyak petani yang memiliki tanah dengan luasan sempit bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Hasil sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun (1993-2003) jumlah petani *gurem* (petani yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha) meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta (dalam Sastraatmadja, 2006: 22). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) maupun dalam UUPA yakni untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tentu belum tercapai.

Pulau Jawa memiliki lahan pertanian (sawah) terluas di Indonesia (dalam www.balittanah.litbang.deptan.go.id). Pulau Jawa terutama daerah pedesaan pada umumnya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa dengan luas wilayah 58.627,512 Ha, dimana 45.331 Ha (77,32 %) luas wilayah

tersebut merupakan daerah pertanian (dalam www.yogyakarta.bps.go.id). Berdasarkan data statistik, pada tahun 2009 terdapat 38.652 rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai dan tebu (PJKT) di Kabupaten Kulon Progo yang menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5 Ha.

Masih banyaknya petani yang memiliki tanah dengan luasan sempit (petani *gurem*) atau tidak memiliki tanah pertanian sama sekali tentunya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Menurut Arminah (2012: 22) “Pengelolaan penggunaan lahan berorientasi untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, dalam hal ini tercapainya kesejahteraan.” Untuk itu perlu peran serta suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam mengatur pengelolaan tanah di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Desa adalah tempat masyarakat tersebut bermukim dan merupakan suatu unit kesatuan yang tak terpisahkan dengan masyarakat desa. Salah satu sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, termasuk di dalamnya adalah tanah kas desa. Sembiring (2004: 40) menjelaskan bahwa “tanah kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaannya diarahkan untuk menunjang upaya pencapaian desa mandiri.” Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 1 angka (16) dijelaskan mengenai pendayagunaan kekayaan desa. Pendayagunaan kekayaan desa tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama

pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.

Berdasarkan hal tersebut, tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa dapat didayagunakan dalam bentuk sewa. Tanah kas desa sebagai milik bersama, juga digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu cara dengan memberikan tanah kas desa untuk digarap oleh masyarakat desa yang kurang atau tidak memiliki tanah. Hal tersebut dimaksud sehingga masyarakat desa yang secara ekonomi kurang sejahtera namun tidak atau kurang memiliki tanah dapat mengolah tanah milik desa tersebut. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat desa yang kurang atau tidak memiliki tanah dibandingkan mereka harus mengolah tanah milik orang lain yang hanya bertujuan mencari keuntungan sehingga para petani tersebut malah dirugikan dan semakin miskin.

Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang merupakan salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo yang mayoritas masyarakatnya masih bekerja di sektor pertanian. Namun, masih banyak terdapat petani yang tidak mempunyai atau hanya mempunyai tanah yang sempit. Tingkat kesejahteraan di desa ini pun masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari total 2.748 Kepala Keluarga (KK) terdapat keluarga pra sejahtera sebanyak 1.239 KK (45,08%) dan keluarga sejahtera I sebanyak 698 KK (25,40%) (dalam *www.kulonprogokab.*

bps.go.id). Untuk itu, sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah desa memberikan tanah kas desa untuk digarap oleh masyarakat desa dengan harga sewa yang murah dan dengan cara bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjararum?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengelolaan tanah kas desa yang diterapkan di Desa Banjararum terhadap tingkat pendapatan petani penggarap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.
- b. Mengetahui pengaruh sistem pengelolaan tanah kas desa terhadap tingkat pendapatan petani penggarap tanah kas desa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
- b. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Desa Banjararum dalam menentukan kebijakan pengelolaan tanah kas desa kedepannya.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada perumusan masalah, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah kas desa dibatasi pada kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tanah kas desa.
2. Tanah kas desa dibatasi pada tanah pertanian.
3. Pengelolaan tanah kas desa dibatasi pada pengelolaan tahun 2012-2013.
4. Pendapatan setara beras sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani penggarap tanah kas desa.

E. Keaslian Penelitian dan Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan tanah kas desa dan kebaruan dari penelitian yang peneliti teliti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa Penelitian Tentang Tanah Kas Desa

No	Peneliti / Tahun / Judul	Metode Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Ahmad Fathoni (2007) Judul: Kajian Keuntungan dan Kerugian Komparatif Berbagai Bentuk Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Studi di Desa Jonggrangan dan Desa Karang)	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi	Desa Jonggrangan: 1. Keuntungan tukar menukar TKD: luas tanah kas desa bertambah dan dapat melakukan pembangunan fasum. 2. Kerugian tukar menukar TKD: tanah pengganti tidak produktif, nilai tanah rendah dan letaknya jauh dari Desa Jonggrangan. Desa Karang: 1. Keuntungan tukar menukar TKD: luasnya TKD bertambah, nilai tanahnya lebih tinggi karena letaknya lebih strategis dan pembangunan gedung. 2. Manfaat tukar menukar TKD: Pembangunan sub terminal sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, transportasi lancar, peningkatan nilai tanah disekitarnya. 3. Sistem sewa TKD lebih efektif untuk saat ini dibanding sistem tukar menukar. 4. Kerugian tukar menukar TKD antara lain nilai tanahnya rendah dan letaknya jauh dari jalan utama.
2.	Pardal Eko Budiman (2007) Judul: Dampak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dari Sistem Bagi Hasil Penggunaan Pertanian Menjadi Sistem Sewa Penggunaan Non Pertanian Terhadap Aspek Pertanahan, Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi (Kasus Pembangunan Pasar Tlagareja di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi - Observasi	Dampak perubahan pengelolaan Tanah Kas Desa meliputi: 1. Aspek Pertanahan: a) Perubahan penguasaan dari aparat desa kepada pengelola pasar dan kepemilikan tanahnya tidak berubah; b) Perubahan penggunaan tanah di lokasi dan di luar lokasi proyek dari pertanian menjadi non pertanian berupa pasar dan bangunan baru berupa rumah tinggal, toko, dan lain-lain; c) Perubahan peralihan hak atas tanah di sekitar dalam kurun waktu 2 tahun setelah beroperasinya pasar Tlagareja terdapat peningkatan sebesar 45 bidang yang disebabkan karena jual beli; d) Harga tanah berdasarkan harga umum dan NJOP meningkat. 2. Aspek Sosial: a) Pembangunan pasar Tlagareja belum berdampak secara signifikan dari aspek sosial yaitu berupa keamanan, hubungan masyarakat dan kesenjangan sosial tidak berpengaruh sama sekali; b) Masyarakat kurang puas dengan beroperasinya pasar karena pasar belum beroperasi secara optimal.

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

1	2		3	4
				3. Aspek Ekonomi: a) Keberadaan pasar Tlagareja telah merubah tingkat ekonomi terutama daerah sekitar pasar; b) Pendapatan masyarakat meningkat dan memperoleh pendapatan yang rutin; c) Pendapatan desa dari tanah kas desa setiap tahun mengalami peningkatan setelah dibangunnya pasar.
3.	Cicilia Indrayati (2008) Judul: Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi	1. Pensertipikatan TKD Pengasih Kecamatan Pengasih, baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006. 2. Pelaksanaan pensertipikatan tanah pengganti TKD Pengasih Kecamatan Pengasih, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pelepasan TKD serta prosedur pengadaaan tanah pengganti TKD Pengasih di Dukuh Kepek telah sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/IZ/2004. 3. Pemanfaatan TKD Pengasih baik sebelum dan setelah dilepaskan belum dapat maksimal memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa Pengasih.
4.	Wasono Gigih Lanang Sejati (2009) Judul: Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kota Batu Provinsi Jawa Timur	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi	1. Adanya perubahan status pemerintahan di Batu dari Kota Administratif menjadi Kota tidak mempengaruhi keberadaan desa. 2. Sistem pengelolaan tanah kas desa yang terdapat di Kecamatan Batu sebelum terbentuk Kota Batu terdiri atas swakelola dan sewa. Kemudian setelah terbentuk Kota Batu sistem pengelolaannya masih tetap sama. Pada tahun 2008 terdapat sistem pengelolaan baru yaitu kerjasama pemanfaatan. 3. Dari 3 macam sistem pengelolaan tanah kas desa yang terdapat di Kecamatan Batu tersebut, jika dilihat berdasarkan pendapatan desa maka yang terbesar adalah sistem pengelolaan tanah kas desa secara Kerjasama Pemanfaatan.
5.	Fina Eni Fujiastuti (2009) Judul: Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi	1. Pemerintah Desa Karangmojo melaksanakan pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. 2. Mekanisme pengelolaan TKD dengan sistem sewa melalui pelelangan di Desa Karangmojo berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Lelang Tanah-tanah Kas Desa Kabupaten Karanganyar.

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

1	2		3	4
6.	Pipin Mustika Sari (2012) Judul: Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo Kecamatan Takeran dan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)	Kualitatif	- Wawancara - Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan TKD Desa Madigondo dan Desa Bandar adalah: a) Swakelola yang dipergunakan untuk bengkok gaji perangkat desa dan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum; b) Sewa yang terbagi menjadi sewa sawah oleh Pabrik Gula dan masyarakat Desa Madigondo dan Desa Bandar, dan sewa kios sebanyak 62 kios di Desa Madigondo. Pengelolaan sewa tanah memiliki kekurangan karena berdasarkan kesepakatan lisan. Kelebihan pengelolaan sewa tanah yaitu prosedur sewa menyewa yang mudah. 2. Kontribusi pengelolaan TKD Madigondo terhadap pembangunan yaitu dipakainya APBDes khususnya pendapatan yang berasal dari pengelolaan TKD untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna pada tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan pembangunan di Desa Bandar yaitu rehab Polindes pada tahun 2009, pelebaran jembatan pada tahun 2010 dan rehab balai desa pada tahun 2011.
7.	Nelson Ibrahim Benu (2013) Judul: Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat).	Kualitatif	- Wawancara - Studi Dokumen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang adalah: secara swakelola (untuk pelungguh/ bengkok sebagai gaji aparat desa, fasilitas umum/fasilitas sosial), disewakan ke pabrik gula (PG) Madukismo dan digarap oleh masyarakat dengan cara sewa dan bagi hasil. 2. Tanah kas desa yang sistem pengelolaannya digarap oleh masyarakat baik dengan cara sewa maupun cara bagi hasil telah memberikan peningkatan bagi pendapatan dan kesejahteraan para petani penggarap. Petani penggarap melalui kelompok-kelompok tani mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa bibit, pupuk, penerapan teknologi pertanian dan sistem bercocok tanam (sistem tanam <i>jajar legowo</i>). Hal tersebut sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Sumber: 1. Penelitian tanah kas desa terdahulu
2. Penelitian tanah kas desa yang dilakukan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian mengenai tanah kas desa terdahulu adalah penelitian ini membahas mengenai: 1) sistem pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan; 2) pengelolaan tanah kas desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesamaan dengan penelitian-penelitian lain tersebut adalah dalam hal metode penelitian yaitu secara kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen/dokumentasi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang adalah: secara swakelola (untuk *pelungguh/bengkok* sebagai gaji aparat desa, fasilitas umum/fasilitas sosial) dengan luas 56,9928 Ha (77,63%), disewakan ke pabrik gula (PG) Madukismo dengan luas 4,651 Ha (6,33%) dan digarap oleh masyarakat dengan cara sewa dan bagi hasil seluas 11,7763 Ha (16,04%).
2. Tanah kas desa yang sistem pengelolaannya digarap oleh masyarakat baik dengan cara sewa maupun cara bagi hasil telah memberikan peningkatan bagi pendapatan dan kesejahteraan para petani penggarap. Petani penggarap melalui kelompok-kelompok tani mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa bibit, pupuk, penerapan teknologi pertanian dan sistem bercocok tanam (sistem tanam *jajar legowo*), hal tersebut sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

B. Saran

1. Tanah kas desa yang digarap oleh masyarakat dengan cara bagi hasil agar porsi pembagian dari hasil panen tidak dibagi sama rata antara petani penggarap dan pihak desa, karena hal tersebut kurang memberikan

keuntungan bagi petani penggarap. Porsi pembagian hasil panen untuk petani penggarap sebaiknya dapat ditingkatkan, misalnya $\frac{2}{3}$ bagian untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pihak desa.

2. Pemerintah Desa Banjararum sebaiknya mengusulkan kepada Dinas Pertanian agar bantuan dapat diberikan pada setiap masa tanam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arminah, Valentina. (2012). *Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung*. STPN Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sajogjo dan Sajogjo, Pudjiwati. (1992). *Sosiologi Pedesaan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sari, Pipin Mustika. (2012). *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)*. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sastraatmadja, Entang. (2006). *Petani Di Tanah Merdeka*. Petani Center HA IPB, Bogor.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sembiring, Julius. (2004). "Pengelolaan Tanah Kas Desa". *Widya Bhumi Nomor 16 Tahun 5*. h. 40-50.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasito, Hermawan. (1993). *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja, A. W. (2002). *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa, Menurut UU No. 5 Tahun 1979*. PT Raja Grafinso Persada, Jakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/buku/tanahsawah/tanahsawah8.pdf> diakses tanggal 01 Januari 2013 pukul 23.06 WIB.

http://distan.majalengkakab.go.id/bid-tp/index.php?option=com_content&view=article&id=2:tanam-padi-sistem-jajar-legowo&catid=2:berita diakses tanggal 06 Juli 2013 pukul 01:55 WIB.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/449/jbptunikompp-gdl-anggunvirg-22437-1-analisis-r.pdf> diakses tanggal 09 September 2013 pukul 00:25 WIB.

<http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/Dr.-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf> diakses tanggal 15 Januari 2013 pukul 00.24 WIB.

<http://kulonprogokab.bps.go.id/> diakses tanggal 01 Januari 2013 pukul 22.29 WIB.

<http://yogyakarta.bps.go.id/tanaman-pangan.html> diakses tanggal 02 Januari 2013 pukul 01.14 WIB.

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_05nov12.pdf diakses tanggal 01 Januari 2013 pukul 21.22 WIB.

<http://www.mdgspolman.org/definisi-dan-konsep-proporsi-penduduk-yang-termasuk-dalam-kategori-pra-sejahtera-dan-sejahtera-i/> diakses tanggal 04 Januari 2013 pukul 03.23 WIB.